

Putusan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika Putusan No. 2854/Pid.Sus/2018/Pn Mdn (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)

Rahma Yanti

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

rahmayanti@gmail.com

Abstract

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah sebagaimana ketentuan hukum pidana dalam hal pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri bila ditinjau berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam apakah pengaturan hukumnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yaitu suatu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada dengan tujuan memberikan penjelasan mengenai pengaturan hukum dan ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika khususnya bagi diri sendiri ditinjau dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Selain itu, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Medan No: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn serta data sekunder yang diperoleh dari literature buku-buku, jurnal, artikel, dan kepastakaan lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian ini. Hasil penelitian ini, dimana pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika khususnya bagi diri sendiri diatur dalam pasal 54, pasal 103, dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan sanksi penyalahgunaan narkotika bila ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam dikenakan hukuman ta'zir yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Ulil Amri atau pemerintah atau penguasa suatu pemerintahan yang tidak ditentukan dalam Al- Qur'an maupun Hadist. Ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam penyalahgunaan narkotika dapat disamakan atau diqiyaskan kedalam khamar, karena khamar dan narkotika memiliki kesamaan yaitu sama-sama memabukkan, dan dapat menghilangkan kesadaran, bahkan dapat menyebabkan kematian terhadap penyalah gunanya.

Keyword: *penyalah guna narkotika; putusan pidana; hukum pidana positif; hukum pidana islam*

Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika bukan hal baru lagi bagi manusia, usianya sudah setara dengan peradaban manusia saat ini. Tidak mudah memerangi permasalahan narkotika karena selalu ada modus baru dalam hal penyalahgunaan narkotika. Narkotika adalah jenis zat atau obat yang sangat dibutuhkan bagi dunia pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi narkotika banyak disalahgunakan tanpa memikirkan bahwa hal tersebut telah melanggar hukum. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri merupakan bahaya besar bagi si pemakai yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat, bangsa dan Negara¹.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa penyalahguna diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum².

Undang-Undang Narkotika telah menganut *double track system* yaitu sistem dua jalur, yang berarti jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pemakai atau penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagai *self victimizing victims* (korban sebagai pelaku) yaitu dalam bentuk menjalani hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban atau pelaku adalah berupa pengobatan dan perawatan dalam bentuk rehabilitasi. Rehabilitasi artinya suatu proses pengobatan dan atau perawatan untuk membebaskan penyalahguna dari ketergantungan³.

Dalam memutuskan dapat atau tidaknya penyalahguna narkotika untuk di rehabilitasi, harus ada pertimbangan komposisi pemakaian yang sudah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga

¹ Sri Suryawati dan Derajad S. Widhyharto Koentjoro, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2015, 1.

² *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Tahun 2013 tentang Narkotika*, Bandung: Citra Umbara, 2016, 4.

³ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: Budi Utama, 2017, 161.

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial⁴.Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkotika bagi diri sendiri telah diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Kajian narkotika dalam hukum pidana Islam tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi narkotika dapat disamakan atau diqiyaskan⁵ kedalam Khamar karena memiliki dampak yang sama yaitu memabukkan, menghilangkan kesadaran, serta merusak jiwa jika menyalahgunakannya. Zat yang digolongkan dengan sejenis minuman memabukkan adalah narkoba, narkoba sendiri berarti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan yang berbahaya. Shalih bin Ghanim As-Sadlan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan narkoba dalam istilah bahasa Arab disebut dengan mukhaddirat, yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang terselubung, kegelapan, atau kelemahan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa narkotika yang memiliki ciri khas yang dapat menyebabkan kelemahan dan kelesuan yang menyerang badan dan anggota tubuh lainnya sebagaimana dalam hal pengaruh khamar⁶.

Pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika berhak terbebas dari kecanduan terhadap narkotika, dan mempunyai hak atas rehabilitasi yang sudah di tetapkan dalam Undang-Undang Narkotika yaitu dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Dengan Latar Belakang Masalah diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul Putusan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Putusan No. 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam).

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Mahkamah Agung RI, "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial", Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No. 04 Tahun 2010, 7 April 2010, 1-3.

⁵ Qiyas menurut istilah ahli ushul fiqh adalah: mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dan dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya. Lihat Zuhri Moh. dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994, 66.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, 80.

1. Bagaimanakah putusan pidana terhadap penyalah guna narkotika dalam putusan No. 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn?
2. Bagaimanakah putusan pidana No. 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui putusan pidana terhadap penyalah guna narkotika dalam putusan No. 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui putusan pidana No. 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Kerangka Teori

Dalam upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika sangat diperlukan ketersediaannya namun bagi para pemakai atau penyalahguna narkotika sangatlah berbahaya dan merugikan. Pemakai atau pengguna dan penyalahgunaan narkotika sudah ada mulai masa penjajahan Hindia Belanda, maka pengaturan narkotika pada saat itu disesuaikan menurut wilayahnya. Seiring dengan perkembangan zaman sehingga keluarlah atau dibentuklah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, karena narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika⁷.

Istilah narkotika dalam hukum pidana Islam disebut sebagai Khamar (minuman yang memabukkan). Berkenaan dengan tanaman yang menjadi makanan, semuanya halal kecuali khamar dan semua jenis nabidz yang terbuat dari sari buah yang kemudian difermentasikan, serta termasuk yang diolah dari madu. Mengenai khamar, para Ulama sepakat atas dasar keharamannya, baik sedikit maupun banyak⁸.

⁷ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Cet. II, Malang: Setara Press, 2015, 9.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Cet. II, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010, 824-823.

Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن نبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سكر كثيره فقله حر⁹

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitpun hukumnya haram”. (HR. Ahmad)

Larangan meminum khamar juga sudah dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 219, Allah SWT berfirman:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”¹⁰. (Al Baqarah: 219)

Narkotika yang diqiyaskan kedalam khamar yang apabila mengonsumsinya dapat menyebabkan mabuk, hilang akal, merusak jiwa dan menguasai hawa nafsu. Bagi orang yang menganggapnya halal dikenakan hukuman had, dan para ulama telah sepakat bahwasanya penyalahgunaan narkotika adalah haram.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Narkotika Ditinjau Dalam Hukum Pidana Positif

1. Narkotika dan Jenis-Jenisnya

Dalam Undang-Undang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, dan dapat

⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*, Cet. IV, Jakarta: Mizan Publika, 2018, 499.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Special For Woman*, Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2007, 34.

menimbulkan ketergantungan¹¹. Narkotika adalah jenis zat atau obat yang sangat dibutuhkan bagi dunia pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa jenis narkotika yang memiliki kegunaan dan berfungsi dalam kehidupan, akan tetapi ada beberapa jenis narkotika yang tidak dibenarkan penggunaannya, dilihat dari bahaya dan bahan dasar dari pembuatannya. Dalam pasal 6 Undang-Undang Narkotika menyebutkan golongan-golongan narkotika terdiri dari:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi akan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat dalam hal pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan mempunyai tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

2. *Sanksi Penyalah Guna Narkotika*

Pengaturan sanksi penyalah guna narkotika khususnya bagi diri sendiri diatur dalam Undang-Undang Narkotika sebagai berikut:

Pasal 127

(1) Setiap penyalah guna

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Tahun 2013 tentang Narkotika, 4.

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam pasal 127 ayat (2) disebutkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103, sebagai berikut:

Pasal 54

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarga kepada pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit dan/atau pusat lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penyalah guna narkoba pada dasarnya adalah korban dari penyalahgunaan narkoba yang melanggar peraturan pemerintah. Undang-Undang Narkoba telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri khususnya dalam hal rehabilitasi. Sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak ada pemberlakuan yang berbeda antara pecandu, pengguna, bandar, maupun produsen narkoba. Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan terhadap narkoba sangat penting, dikarenakan semakin bertambahnya penyalah guna narkoba dikalangan anak-anak dan remaja, maupun dikalangan orang dewasa.

Adapun jenis-jenis rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkoba terdiri dari 2 (dua), yaitu:

a. Rehabilitasi Medis

Yaitu suatu proses kegiatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Narkoba.

b. Rehabilitasi Sosial

Adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Narkoba¹².

Wajibnya rehabilitasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Narkoba dalam pasal 54 bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4

¹² Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Tahun 2013 tentang Narkoba, 5.

Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial¹³.

B. Narkotika Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam

1. Hukum Pidana Islam

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti, seperangkat peraturan yang berasal dari wahyu Allah dan Hadits nabi Muhammad SAW tentang tingkah laku seorang mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam¹⁴. Dalam hukum Islam terdapat bagian yang membahas mengenai tindak pidana, atau suatu perbuatan pidana. Ada tiga istilah yang digunakan dalam pengertian tindak pidana ini, yaitu:

a. Jarimah

Dalam bahasa Arab hukum pidana Islam disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Secara terminologis jarimah dapat diartikan sebagai suatu larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta’zir. Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan suatu peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

b. Jinayah

Secara etimologis, jinayah berasal dari kata jana-yajni-jinayatan, yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis, jinayah itu adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu merugikan jiwa, dan harta benda lainnya. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana yaitu suatu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut tindak pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta dan lainnya¹⁵.

¹³ Mahkamah Agung RI, *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, 1-3.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam Dalam Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, 14.

¹⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, 41.

c. Ma'shiyat

Ma'shiyat dalam hukum pidana Islam mengandung makna melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum, sehingga dapat diartikan ma'shiyat sendiri hanya mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang dilakukan. Dalam tindak pidana (jarimah) dibagi dalam beberapa bagian diantaranya, jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah ta'zir. Hudud jamak dari hadd yang makna dasarnya berarti mencegah. Secara terminologis hudud merupakan hukuman yang telah ditetapkan syari'at untuk mencegah kejahatan. Hudud adalah hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah. Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum, seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukum tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.

2. *Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam*

Fondasi hukum Islam bersandar kepada kaidah “menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan dan bahaya”. Ketika syariat yang hukum-hukumnya dibangun berdasarkan kaidah, maka syariat yang dimaksud yaitu mengharamkan segala jenis zat yang bisa menimbulkan bahaya atau sesuatu yang lebih buruk, baik itu narkotika dalam bentuk zat, minuman, makanan, padat, cair, maupun dalam bentuk bubuk, karena Islam memerintahkan manusia untuk memelihara akal dan tubuh agar mereka layak dalam masyarakat dan mencegah dari perbuatan kumungaran. Allah SWT mengistimewakan manusia yang dikaruniakan dengan otak yang mampu berfikir dengan akal. Akan tetapi kecanduan narkotika dan segala jenisnya akan mengacaukan fungsi akal dan melumpuhkan tugas dan fungsi alamiahnya, maka hal inilah yang menjadikan manusia sebagai budak atas obat-obatan terlarang seperti narkotika yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran akal manusia¹⁶.

Pembangunan manusia seutuhnya (al-insan al-kamil) merupakan amanat dari Allah yang harus dipelihara, dengan mengembangkan dan mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Amanat atau perintah Allah tidak dapat diwujudkan bilamana penyalahgunaan narkotika tetap berjalan. Penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai pemakai atau penyalah guna narkotika diluar indikasi medis, tanpa petunjuk dan resep dokter, dan pemakaiannya dapat menimbulkan hambatan dalam aktivitas rumah,

¹⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009, 93.

sekolah, lingkungan, dan di lingkungan pekerjaan¹⁷. Dalam hukum Islam narkotika dapat diqiyaskan dengan khamar, diqiyaskan artinya yaitu mempersamakan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya hukum dengan suatu peristiwa yang belum ada nashnya dikarenakan adanya persamaan 'illat hukumnya dari kedua peristiwa itu¹⁸. Secara etimologis khamar dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang menutupi, dan secara terminologis khamar menurut pendapat para ahli dapat diartikan sebagai:

- a. Menurut Muhammad Ali al-Shabunu, khamar adalah sesuatu yang memabukkan, baik berasal dari anggur maupun lainnya, disebut khamar karena dapat menutupi akal.
- b. Menurut al-Anshari, khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan dengan khamar atau bukan, baik dari anggur atau lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mengartikan khamar. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa yang dimaksud dengan khamar itu adalah minuman yang memabukkan baik itu disebut khamar maupun tidak. Sedangkan Imam Abu Hanifah beliau mengharamkan meminum khamar baik sedikit maupun banyak, adapun minuman lain yang memabukkan dan bukan khamar menurut beliau dapat dikatakan sebagai khamar yaitu minuman yang memabukkan. Memabukkan selain khamar keharamannya bukan lidzatihi, maka yang haram adalah minuman yang terakhir yang membawa kemabukan¹⁹.

Minuman atau makanan yang memabukkan mencakup segala jenis barang yang apabila dikonsumsi akan memabukkan, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Muslim merawikan dari Jabir R.A berkata:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَّةِ يُقَالُ لَهُ الْمَزْرُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْ مُسْكِرٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَاةُ أَهْلِ النَّارِ.

¹⁷ Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FASEI), *Istishlah Jurnal Hukum Islam*, Vol. VI, No. 1 (Januari-Juni 2013): 121.

¹⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983, 66.

¹⁹ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar*, Jakarta: Ummul Qura, 2014, 151.

Artinya: “Dari Jabir ra mengatakan “Bahwasanya seorang laki-laki dari Jaisyan, Yaman, datang menemui Nabi SAW. Dia bertanya tentang “mixr”, minuman yang terbuat dari perasan biji- bijian (jagung atau gandum) yang biasa diminum di kampung, mereka. Nabi SAW bertanya kepada laki-laki itu, “apakah minuman tersebut memabukkan?” dia menjawab “ya”. Nabi SAW kemudian bersabda, “setiap sesuatu yang memabukkan haram. Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan ancaman untuk orang yang meminum-minuman yang memabukkan, yaitu memberinya minuman dari thin al-khabal”. Orang-orang bertanya, “apakah thin al-khabal itu?” Nabi SAW menjawab, “keringat penghuni neraka, atau perasan tubuh penghuni neraka.”

Hukum diharamkannya khamar tidaklah dibebankan hanya karena namanya, sehingga dengan perubahan namanya berarti mengubah hukumnya. Namun, yang dipertimbangkan adalah karena unsur memabukkannya yang dapat menghilangkan kesadaran, hilang akal, dapat menyebabkan ketergantungan, dan menguasai hawa nafsu seseorang yang memakainya, demikian halnya dengan narkotika yang sifatnya sama dengan khamar²⁰.

3. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam

Al-Qur’an diturunkan kepada masyarakat jahiliya yang memiliki kebiasaan minuman khamar, mabuk-mabukan dan untuk mengubah kondisi yang demikian ditempuhlah dengan cara at-tadrij (bertahap):

- a. Dinyatakan bahwa khamar dan maisilz (judi) itu mengandung dosa besar meskipun mengandung manfaat bagi manusia, akan tetapi madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan sudah jelas tertuang dalam QS. Al Baqarah ayat 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang

²⁰ Mustafa Dib Al-Bugha, Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i, 499-500.

mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS. Al Baqarah: 219)

- b. Dinyatakan bahwa tidak boleh melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk, yang sudah di jelaskan dalam Q.S An Nisaa' ayat 43:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”. (QS. An Nisaa': 43)

- c. Secara tegas dinyatakan bahwa khamar itu salah satu perbuatan setan dan karenanya harus dijauhi, dijelaskan dalam QS. Al Maaidah ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al Maaidah: 90)

Adapun larangan meminum khamar sudah di tetapkan kian dalam Al-Qur'an, dan sanksi hukuman yang di tetapkan kepada peminum khamar yaitu berupa hukuman had. Sedangkan narkotika dalam hukum pidana Islam sanksi hukumannya digolongkan ke

dalam jarimah ta'zir, hal ini sesuai dengan prinsip penetapan jarimah ta'zir, yaitu prinsip utama yang menjadi dasar acuan para penguasa atau pemerintah dan juga hakim dalam menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatannya (bahaya).

Dalam hal penyelesaian tentang ketentuan hukum antara narkoba dengan khamar menggunakan pendekatan qiyas sebagai berikut:

- a. Al-Ashal yaitu khamar, khamar dalam hal ini merupakan suatu perbuatan hukum yang hukumannya telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an.
- b. Al-far'u (cabang) yaitu narkoba, karena tidak ada nash hukumnya dalam Al-Qur'an maupun hadis, akan tetapi maksud menyamakan status hukumannya kepada nash yakni khamar, dalam artiannya menyerupakan dengan khamar atau disebut dengan al-musyabbah.
- c. Al-illat (sifat asal, atau sifat yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada far'u yang belum ditetapkan hukumnya), dampak dari khamar yaitu dapat memabukkan, menghilangkan akal pikiran, dan dapat melupakan Allah. Sedangkan narkoba adalah al-Far'u karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya, dan narkoba telah menyamai khamar dalam kedudukannya yaitu sama-sama dapat memabukkan, menghilangkan kesadaran, dan sama-sama dapat melupakan Allah.

C. Ringkasan Posisi Kasus Pada Putusan Nomor 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani pergi kerumah teman terdakwa di Jalan Karya Gg. Swadaya untuk menemui teman terdakwa bernama Andre (belum tertangkap), dan setelah itu terdakwa mengatakan: "mau kemana", kemudian Andre menjawab: "gak ada", lalu terdakwa berkata: "pergi kesana yuk", dengan maksud ingin membeli narkoba jenis Shabu, kemudian Andre menjawab: "yaudah", dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.40.000,(empat puluh ribu rupiah) kepada Andre dan terdakwa bersama Andre pergi ke Jalan Sekata dengan mengendarai sepeda motor milik Andre.Sesampainya disana terdakwa dan Andre bertemu dengan Roy (belum tertangkap), kemudian Andre mendekati Roy sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik Andre. Lalu terdakwa dan Andre langsung pergi menuju rumah terdakwa, pada saat dirumah terdakwa Andre mengatakan: "ini "barangnya", sambil menunjukkan 1 (satu) buah plastic klip kecil warna putih bening didalamnya terdapat Narkoba jenis Shabu.

Kemudian terdakwa dan Andre masuk kedalam rumah dan menuju dapur rumah terdakwa, dan sesampainya di dapur Andre langsung keluar rumah dan kembali lagi sekitar 2 (dua) menit dengan membawa 1 (satu) botol air minum Aqua Cup Qlen Q, dan 3 (tiga) buah pipet plastik, serta 1 (satu) buah kaca pirex. Bahwa, kemudian Andre merakitnya menjadi Bong (alat hisap Shabu), lalu Andre mengambil sebagian narkotika jenis Shabu dan memasukkannya kedalam kaca pirex, kemudian terdakwa membakarnya dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, sedangkan Andre juga 2 (dua) kali hisapan. Kemudian sisa shabu tersebut di berikan Andre kepada terdakwa dan mengatakan: “simpan dulu” dan terdakwa menjawab: “yaudah”, lalu terdakwa menyimpan sisa shabu tersebut diatas pakaian yang berada di dapur rumah terdakwa, dan Andre pergi ke warung internet yang tidak jauh dari rumah terdakwa.

Pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa kembali kerumah, kemudian pada jam 16.00 Wib datanglah saksi Irawan, saksi Eko Prianto, saksi Surya Prayitna, Aprizal, dan saksi JP Lumbagaol yang merupakan pihak Kepolisian Polsek Medan Barat menangkap terdakwa. Dan para saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan mendapatkan bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna putih bening berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 0.14 gram, 3 (tiga) buah pipet kecil warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minum Aqua cup Clen Q.

Setelah diadakan pemeriksaan terhadap terdakwa, berdasarkan hasil Labfor No: 8488/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri cabang Medan. Bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urin milik terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani bahwa benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut lampiran 61 Undang-Undang Narkotika.

Dengan memperhatikan pasal 127 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. bahwa mengadili terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.

D. Analisis Putusan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Putusan No. 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn Berdasarkan Hukum Pidana Positif

Seperti dalam kasus yang telah penulis temukan yaitu dalam putusan No: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn bahwa penulis telah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu Bapak Tengku Oyong, SH.,MH beliau menjelaskan bahwa dalam putusan pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan membenarkan terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani di vonis bersalah oleh hakim karena terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dan positif menggunakan narkotika Metamfetamina jenis shabu yang terdapat dalam Golongan I dalam lampiran 61 dan divonis 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap terdakwa tanpa adanya rehabilitasi karena terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dan Hakim membenarkan bahwa vonis putusan pidana penjara terhadap terdakwa sudah sesuai dalam penerapan Undang- Undang Narkotika karena terdakwa bukan seorang korban akan tetapi terdakwa disini merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan pelaku penyalahgunaan narkotika hanya bisa dipidana penjara tanpa adanya rehabilitasi.

Dalam wawancara yang juga dilakukan oleh penulis di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan narasumber yaitu Bapak Suku G.S selaku Dokter di bagian rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera utara. Beliau menjelaskan bahwa dalam putusan pidana No: 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn terdakwa dalam kasus ini sudah bisa dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan berhak mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sangatlah diperlukan oleh terdakwa karena dampak kecanduan terhadap narkotika tidak bisa dihilangkan tanpa adanya rehabilitasi. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 terdakwa bisa direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebagai tolak ukur yang dapat dikenakan bagi penyalah guna narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan:

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Setelah penulis meneliti kasus dalam putusan 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn sesuai dalam Undang-Undang Narkotika Hakim dalam putusan ini sebenarnya dapat memberikan kesempatan terhadap terdakwa berupa vonis rehabilitasi terhadap terdakwa jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Narkotika dalam pasal 127 ayat (2), pasal 54, dan pasal 103 huruf a. Dan jika ditinjau berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dalam Sema No. 4 tahun 2010 menyebutkan seorang pecandu atau penyalahgunaan narkotika dapat di tempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan melihat komposisi pemakaian dari terdakwa dan kriteria seorang terdakwa:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakai 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok Metamphetamine (shabu): 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gram= 8 butir
 3. Kelompok Heroin: 1.8 gram
 4. Kelompok Kokain: 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja: 5 gram
 6. Daun Koka: 5 gram
 7. Meskalin: 5 gram
 8. Kelompok psilosybin: 3 gram

9. Kelompok LSD (d-lysegic acid diethylamide): 2 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine): 3 gram
 11. Kelompok Fentanil: 1 gram
 12. Kelompok Metadon: 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin: 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin: 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein: 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin: 32 mg
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika²¹.

Bila melihat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 bahwa terdakwa pada saat tertangkap tangan ditangkap langsung oleh kepolisian Polsek Medan Barat. Dan pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti di rumah terdakwa Dani yaitu di dapur rumah terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak merek magnum yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi narkotika jenis shabu seberat 0.14 gram, 3 (tiga) buah sedotan atau pipet kecil berwarna putih, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) kaca pirez.

Setelah diadakan pemeriksaan terhadap terdakwa, berdasarkan hasil Labfor No: 8488/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri cabang Medan. Bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urin milik terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani bahwa benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut lampiran 61 dan tidak terbukti terlibat dalam hal peredaran gelap narkotika, terdakwa Dani hanya sebagai konsumen yang digunakan untuk diri sendiri. dan dalam putusannyapun hakim membenarkan bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika begi diri dendiri tanpa terikat dan terlibat dengan peredaran gelap narkotika.

²¹ Mahkamah Agung RI, *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, 1-3.

E. Analisis Putusan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Putusan No. 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam.

Pengharaman narkotika jelas mempunyai tujuan karena narkotika mempunyai dampak yang buruk khususnya dalam hal agama, jiwa, keturunan, dan harta. Hukum peminum khamar dalam hukum pidana Islam dikenakan dengan hukuman had. Sedangkan hukum pengguna narkotika dalam hukum pidana Islam dikenakan berupa jarimah ta'zir.

Pengaturan hukum di Indonesia dalam hal hukum pidana Islam mengenai narkotika sudah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hukum Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkotika, ditetapkan bahwa hukuman had merupakan jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash, sedangkan ta'zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil mari (pihak yang berwenang menetapkan hukum)²².

Para ulama telah sepakat menghukum peminum khamar dengan hukuman had. Akan tetapi beberapa Ulama berbeda pendapat dalam hal banyak dan sedikitnya hukuman deraan yang akan dikenakan terhadap peminum khamar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jumlah deraan bagi peminum khamar yaitu empat puluh kali jilid, sedangkan penambahan hukuman sampai delapan puluh kali jilid dihitung sebagai jarimah ta'zir, dan penjatuhannya menjadi dasar otoritas hakim dalam penjatuhan hukumannya. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menghukum peminum khamar dengan deraan sebanyak delapan puluh kali jilid²³.

Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Rasul yaitu sebanyak empat puluh kali jilid, dan kemudian memperbanyak hukumannya pada masa 'Umar sebanyak delapan puluh kali jilid, dengan harapan agar kebiasaan meminum khamar betul-betul hilang di kalangan masyarakat. Sebagaimana dalam penjelasan dari Anas bin Malik r.a berkata:

²² Majelis Ulama Indonesia, "Hukum Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahguna Narkotika", Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 53 Tahun 2014, Jakarta, 30 Desember 2014 M, 1-7.

²³ H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008 Cet II), h. 116.

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ لَدَى شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدٍ ثَبْنٍ نَحْوِ أَرْبَعِينَ قَالًا: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَتْ عُمُرًا اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفَّ الْحُدُودُ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ²⁴

Artinya : “Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW dihadapkan dengan seorang laki-laki yang telah meminum khamar kemudian beliau menderanya dengan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas juga berkata, “Setelah itu Abu Bakar pun melakukan hal yang sama. Ketika Umar berkuasa, dia pun meminta pendapat orang lain, kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, “Sanksi hukuman dera yang paling ringan adalah delapan puluh kali”.Setelah itu Umar pun mengintruksikan agar menerapkan sanksi tersebut”. (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tarmidzi, dan Ahmad)

Dalam hadis lain mengenai sanksi peminum khamar yang dikatakan oleh Hudhain bin Mundzir r.a:

عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأْتَى بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَةَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَرِيدُ كُمْ؟ فَسَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ن، أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ لَا يَتَّقِيهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَّقِ يَأْ حَتَّى شَرِبَ بِهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ فَمُ فَجَلَدُهُ، فَقَالَ عَلِيُّ: فَمُ يَا حَسَنُ فَجَلَدُهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلَ خَارَهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا، فَكَانَ هُوَ وَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَمُ فَا جَلَّ يَدَهُ، فَجَلَدَهُ، وَعَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةٍ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ²⁵.

Artinya: “Dari Hudhain bin Mundzir, ayah Samsan, mengatakan bahwa ia menyaksikan seorang laki-laki dibawa kepada Utsman bin Affan r.a setelah salat subuh dua rakaat, lalu Utsman bertanya, “Apakah kalian membawa bukti (saksi)?” Maka, ada dua orang yang memberikan kesaksian, yang satu adalah Humran yang bersaksi laki-laki tersebut telah minum khamar, ada saksi yang lain mengatakan bahwa dia melihat laki-laki itu muntah-muntah. Kata Utsman, “laki-laki ini tidaklah muntah kecuali telah meminum khamar”. Maka Utsman mengatakan, “Hai Ali! Berdirilah lalu cambuklah dia!” Kata Ali, “Hai Hasan! Berdirilah lalu cambuklah dia!” Hasan menjawab, “Alihkan tugas mencambuk dari orang yang panas karena melihat peminum khamar kepada orang lain yang berpikiran dingin”Sepertinya Hasan marah kepada laki-laki yang meminum khamar tersebut, kata Ali. “Hai Abdullah bin Jaffar! Berdirilah lalu cambuklah dia!” maka Abdullah bin Jaffar mencambuknya mencapai 40 kali, lalu Alimengatakan, “Hentikan”, kemudian Ali r.a. mengatakan, “Nabi SAW mencambuk 40 kali, Abu Bakar r.a. mencambuk 40 kali, dan Umar r.a. mencambuk 80 kali masing-masing tersebut adalah sunnah (ajaran), sedangkan yang 40 kali ini lebih aku senang.”

²⁴ Ibnu Daqiq Al Id, Op. Cit., h. 516.

²⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, 503.

Bila dikaitkan dalam kasus yang telah peneliti temukan dalam putusan pengadilan negeri Medan yaitu putusan Nomor 2954/Pid.Sus/2018/PN Mdn bahwa terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani terbukti menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan diancam dengan hukuman selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara.

Hukuman had yang ditetapkan kepada peminum khamar merupakan ketentuan yang sudah di tentukan oleh Allah dan tidak dapat diubah. Sedangkan hukuman ta'zir bagi penyalah guna narkotika merupakan hak penuh yang diberikan kepada hakim atau suatu pemimpin dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa. Vonis putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani dalam putusan Nomor 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Jika ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam sanksi hukuman terhadap penyalah guna narkotika dikenakan jarimah ta'zir, dan penjatuhan hukuman ini sudah sesuai karena jarimah ta'zir adalah hukuman yang tunduk terhadap kebijakan pemerintah, serta badan perundangan, dan Hakim. Akan tetapi bentuk keputusan yang diberikan oleh Hakim terhadap terdakwa Dani bila ditinjau kembali berdasarkan hukum pidana positif belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Putusan pidana terhadap penyalahguna narkotika dalam putusan No. 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn memutus terdakwa Rahmad Rahmadhani alias Dani dengan vonis putusan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara karena terbukti menyalahgunakan narkotika jenis Shabu yang terdapat dalam lampiran 61 yaitu jenis Metamfetamina. Menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan menjatuhkan vonis putusan berdasarkan Undang-Undang Narkotika dalam pasal 127 ayat (1) tanpa adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Putusan pidana No. 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn ditinjau dari hukum pidana positif, bahwa vonis putusan yang diberikan oleh Hakim terhadap terdakwa belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Terdakwa dijatuhi sanksi pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dalam pasal 127 ayat (2) menyebutkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang

di dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan adanya kewajiban untuk merehabilitasi terdakwa ataupun korban penyalahgunaan narkotika khususnya bagi diri sendiri. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) penyalahguna narkotika, atau korban penyalahgunaan narkotika dapat direhabilitasi sesuai dengan jenis dan kelompok serta berat narkotika yang digunakan, terdakwa positif mengonsumsi Shabu jenis Metamphetamine seberat 0,14 gram, dan dalam jenis narkotika ini terdakwa bisa direhabilitasi apabila tidak melebihi 1 gram narkotika jenis Metamphetamine. Akan tetapi pada kenyataannya sesuai dalam putusan No. 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn tidak memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk direhabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

B. Saran

1. Bagi para penegak hukum alangkah lebih baiknya memberika kesempatan kepada pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika untuk dapat di rehabilitasi, karena dalam Undang-Undang Narkotika khususnya dalam hal penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sudah diatur bahwa pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Bagi masyarakat yang mengetahui bahwa keluarga maupun masyarakat yang berada disekitarnya positif menggunakan narkotika haruslah melaporkannya ke pihak yang berwajib atau ke BNN (Badan Narkotika Nasional). Dan memberikan perhatian ekstra ketat agar penyalahgunaan narkotika ini tidak semakin menyebar di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Koesno. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Cet. II. Malang: Setara Press, 2015.
- Adz-Dzahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman. *Dosa-Dosa Besar*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*. Cet. IV. Jakarta: Mizan Publika, 2008.

- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Budi Utama, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Woman*. Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2007.
- Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam (FASEI). *Istishlah Jurnal Hukum Islam* Vol. VI, no. 1 (Januari-Juni 2013): 121.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqasyid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Mahkamah Agung RI. “Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.” Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No. 4 Tahun 2010, 07 April 2010.
- Majelis Ulama Indonesia. “Hukum Bagi Produsen, Bandar, Pengedar dan Penyalahguna Narkoba.” Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 53 Tahun 2014, Jakarta, 30 Desember 2014 M.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Cet. II. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Suryawati, Sri, dan Derajad S. Widhyharto Koentjoro. *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. Yogyakarta: Gadjad Mada Universitas Press, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam Dalam Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan PP RI Tahun 2013 tentang Narkotika. Bandung: Citra Umbara, 2016.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Zuhri, Moh., dan Ahmad Qarib. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.